

Pemerintahan Trump dan Erosi Kebebasan Berbicara

Pendahuluan

Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat menjamin kebebasan berbicara, sebuah pilar demokrasi yang memungkinkan kritik terhadap pemerintah dan wacana politik tanpa rasa takut akan pembalasan. Namun, pada tahun 2025, pemerintahan Presiden Donald Trump secara sistematis merusak hak ini untuk memprioritaskan kepentingan Israel, khususnya untuk melindungi genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina. Penembakan pada 22 Mei 2025 di Washington, D.C., terhadap staf kedutaan Israel dan respons dari pejabat Departemen Kehakiman (DOJ) Pam Bondi dan Leo Terrell, yang diperkuat oleh kelompok pro-Israel @StopAntisemites, menjadi contoh tren ini. Perintah Eksekutif 14188, yang ditandatangani pada 29 Januari 2025, menetapkan niat awal pemerintahan untuk menargetkan kritik seperti influencer TikTok Guy Christensen, yang keberaniannya mencerminkan perlawanan Sophie Scholl terhadap penindasan Nazi. Dengan menempatkan agenda Israel di atas hak-hak konstitusional Amerika, pemerintahan Trump melanggar tugasnya, menekan kebebasan berbicara, dan membiarkan genosida Israel.

Konteks: Penembakan di Washington, D.C. dan Wacana Publik

Pada 22 Mei 2025, Elias Rodriguez, seorang warga Chicago berusia 30 tahun dan pendukung Palestina, menembak dan membunuh dua staf kedutaan Israel, Yaron Lischinsky dan Sarah Milgrim, di luar Museum Yahudi Ibu Kota di Washington, D.C. Rodriguez berteriak “Bebas, bebas Palestina” setelah penangkapannya, secara eksplisit menghubungkan tindakannya dengan genosida Israel di Gaza. Genosida ini, yang didokumentasikan oleh Amnesty International, mencakup pemusnahan yang disengaja melalui kebijakan kelaparan, dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut warga Palestina sebagai “hewan manusia” dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyatakan, “Tidak satu butir gandum pun akan masuk ke Gaza.” Influencer TikTok Guy Christensen mengutuk kekerasan tersebut tetapi mengontekstualisasikannya, membandingkannya dengan pembunuhan seorang diplomat Nazi oleh Herschel Grynszpan pada tahun 1938—sebuah tindakan putus asa yang lahir dari penindasan. Tindakan Grynszpan menggambarkan bagaimana penindasan sistemik, seperti genosida Israel, memicu kekerasan, yang kemudian dieksploitasi untuk membenarkan kekerasan lebih lanjut, seperti yang dilakukan Jerman Nazi untuk memicu Kristallnacht. Christensen, seperti Sophie Scholl, yang menghadapi eksekusi karena mengutuk kejahatan Nazi, mengkritik genosida Israel, mencatat hubungan Lischinsky dengan IDF dan identitas Kristennya untuk menantang klaim antisemitisme.

Pernyataan Christensen dilindungi oleh Amandemen Pertama. Putusan Mahkamah Agung dalam *Brandenburg v. Ohio* (1969) melindungi ucapan kecuali jika memicu tindakan melawan hukum yang segera dengan niat dan kemungkinan. Analogi Christensen dan kritiknya terhadap genosida Israel—sebuah kejahatan berdasarkan Konvensi Genosida 1948—berada dalam batas-batas konstitusional, menggemakan perbedaan pendapat berprinsip Scholl.

Lobi Israel dan Peran @StopAntisemites

@StopAntisemites, sebuah kelompok pro-Israel, merespons pada 23 Mei 2025, menyebut komentar Christensen sebagai “memuliakan terorisme,” “menyebarkan propaganda antisemit,” dan “merayakan pembunuhan orang Yahudi,” meskipun fokusnya adalah pada kebijakan genosida Israel, bukan identitas Yahudi. Dikenal karena doxxing dan mengintimidasi kritik, kelompok ini sejalan dengan Komite Urusan Publik Amerika-Israel (AIPAC), yang telah memprioritaskan kepentingan Israel sejak 1960-an, menghindari pengawasan Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing (FARA) meskipun dikritik oleh Senator J.W. Fulbright. Pengaruh AIPAC melindungi Israel dari pertanggungjawaban atas genosidanya, termasuk retorika dehumanisasi Gallant dan dekrit kelaparan Smotrich, memungkinkan kebijakan yang dilindungi pemerintahan Trump di atas hak kebebasan berbicara Amerika.

Agenda Pro-Israel Pemerintahan Trump: Perintah Eksekutif 14188 dan Tindakan DOJ

Penargetan pemerintahan Trump terhadap Christensen mencerminkan agenda pro-Israel yang disengaja, berakar pada kebijakan seperti Perintah Eksekutif 14188, yang ditandatangani pada 29 Januari 2025, beberapa bulan sebelum penembakan. EO 14188 memperluas definisi antisemitisme untuk mencakup kritik tertentu terhadap Israel, memberdayakan badan-badan federal untuk menyelidiki dan menghukum ucapan yang dilindungi, terutama di kampus dan platform online. Kebijakan yang sudah ada sebelumnya ini membuka jalan bagi pejabat DOJ Leo Terrell dan Pam Bondi untuk memperkuat postingan @StopAntisemites pada 23 Mei 2025. Terrell, Penasihat Senior untuk Asisten Jaksa Agung Divisi Hak Sipil, menyatakan, “Akan meninjau semua petunjuk!” dengan tautan ke narasi @StopAntisemites, sementara Bondi, Jaksa Agung AS, menjawab, “TERIMA KASIH LEO!” Postingan mereka, dilihat 494,9K dan 1,4M kali, mendukung kelompok yang membela genosida Israel sambil memberi sinyal pengawasan federal terhadap kritik, sesuai dengan kerangka EO 14188.

Pendekatan pro-Israel ini melanggar pedoman DOJ dalam *Justice Manual*, yang melarang pernyataan yang dapat memengaruhi penyelidikan yang sedang berlangsung. Motif Rodriguez, yang terkait dengan genosida Israel, sedang diselidiki, namun tindakan Terrell dan Bondi berisiko memengaruhi kasus tersebut dengan mendukung kerangka @StopAntisemites. Perilaku mereka mencerminkan kebijakan Trump yang lebih luas untuk memprioritaskan Israel—terlihat dari pemindahan kedutaan ke Yerusalem pada 2018, dukungan tak tergoyahkan untuk AIPAC, dan EO 14188—menempatkan kepentingan Israel

di atas perlindungan konstitusional Amerika. Sikap berprinsip Christensen, seperti Scholl, ditargetkan untuk membungkam perbedaan pendapat terhadap kejahatan Israel.

Kerangka Politik dan Pengaruh AIPAC

Banyak politisi AS, terutama tokoh GOP dan MAGA yang terkait dengan AIPAC seperti Senator Ted Cruz dan Anggota Kongres Marjorie Taylor Greene, segera membingkai penembakan sebagai terorisme antisemit Muslim, meskipun Rodriguez bukan Muslim dan motifnya jelas bersifat politik—menentang genosida Israel, ditandai dengan penghinaan Gallant “hewan manusia” dan kebijakan Smotrich “tidak satu butir gandum pun.” Penokohan salah yang disengaja ini, didorong oleh pengaruh AIPAC, mengeksploitasi tragedi untuk memfitnah advokasi Palestina dan membenarkan tindakan lebih keras terhadap kritik, mencerminkan penggunaan Jerman Nazi atas tindakan Grynszpan untuk meningkatkan kekerasan terhadap orang Yahudi. Dengan menyelaraskan diri dengan narasi ini, pemerintahan Trump memprioritaskan citra Israel di atas kebenaran, merusak hak kebebasan berbicara Amerika.

Penekanan Kebebasan Berbicara dan Pembiaran Genosida

Agenda pro-Israel pemerintahan Trump, melalui EO 14188 dan dukungan DOJ terhadap @StopAntisemites, menekan kebebasan berbicara dan membiarkan genosida Israel. Ucapan Christensen yang dilindungi, seperti pamflet Scholl yang mengungkap kejahatan Nazi, salah dikarakterisasi untuk membenarkan konsekuensi potensial, berdasarkan perintah eksekutif Trump 2019 yang menargetkan aktivisme kampus. Tindakan DOJ, didorong oleh pengaruh AIPAC, membungkam wacana tentang genosida Israel—dibuktikan oleh retorika dehumanisasi Gallant, dekrit kelaparan Smotrich, dan temuan awal ICJ tentang tindakan genosida yang mungkin terjadi. Dengan memprioritaskan Israel di atas hak-hak Amerika, pemerintahan ini merusak perlindungan Amandemen Pertama terhadap ucapan kontroversial, sebagaimana ditegaskan dalam *Snyder v. Phelps* (2011).

Implikasi Konstitusional dan Paralel Historis

Erosi kebebasan berbicara sejajar dengan taktik Jerman Nazi, di mana tindakan Grynszpan dieksploitasi untuk membenarkan Kristallnacht, memicu siklus kekerasan. Demikian pula, politisi yang didukung AIPAC dan @StopAntisemites menggunakan tindakan Rodriguez untuk menekan kritik terhadap genosida Israel, berisiko menimbulkan tuduhan kolektif dengan mencampuradukkannya dengan antisemitisme. Kebijakan pro-Israel pemerintahan Trump, dari EO 14188 hingga tindakan DOJ, menciptakan efek menakutkan, mencegah warga Amerika untuk membahas kejahatan seperti yang dijelaskan oleh Gallant dan Smotrich. Keberanian Christensen, seperti Scholl, menjadi benteng melawan tren otoriter ini, namun menghadapi intimidasi federal.

Kesimpulan

Respons pemerintahan Trump terhadap penembakan di Washington, D.C., yang dipandu oleh kerangka Perintah Eksekutif 14188 yang telah ditetapkan sebelumnya dan dukungan pejabat DOJ terhadap @StopAntisemites, mengungkapkan prioritas yang disengaja terhadap kepentingan Israel di atas hak-hak konstitusional Amerika. Dengan menargetkan ucapan yang dilindungi dari Guy Christensen—mirip dengan perlawanan Sophie Scholl—dan salah membingkai tindakan Rodriguez sebagai terorisme antisemit Muslim, pemerintahan yang dipengaruhi AIPAC ini membiarkan genosida Israel, yang ditandai dengan retorika “hewan manusia” Gallant dan kebijakan “tidak satu butir gandum pun” Smotrich. Tindakan ini melanggar Amandemen Pertama, memicu siklus penindasan dan kekerasan, serta merusak demokrasi. Untuk menjaga nilai-nilai Amerika, pemerintahan harus menghentikan perlindungan Israel dari pertanggungjawaban dan melindungi kritik terhadap genosida sebagai hak fundamental.

Kutipan Utama

- *Brandenburg v. Ohio*, 395 U.S. 444 (1969)
- *Snyder v. Phelps*, 562 U.S. 443 (2011)
- DOJ *Justice Manual*: Hubungan Media
- Wikipedia: StopAntisemitism
- Wikipedia: AIPAC
- Wikipedia: Herschel Grynszpan
- Wikipedia: Sophie Scholl
- Amnesty International: Genosida di Gaza
- Kasus Genosida ICJ: Retorika Israel
- Perintah Eksekutif 14188